

ANALISIS PENERIMAAN NEGARA DAN BEBAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Sri Yulianti Mozin¹

r.yulmozin@ung.ac.id¹

¹Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRACT

State revenue and the distribution of government burdens are fundamental factors in supporting sustainable economic development. This study analyzes the sources of state revenue, including taxes and Non-Tax State Revenue (PNBP), as well as the distribution of government burdens through the state and regional budgets (APBN and APBD) from an economic development perspective. The research employs a literature review method, gathering data from reliable sources such as books, scientific articles, and official reports. The findings indicate that taxes are the primary contributor to state revenue, reaching Rp1,932.4 trillion in 2024, while PNBP amounted to Rp579.5 trillion. The distribution of balancing funds has been effective in reducing fiscal disparities between regions, although challenges such as budget inefficiency and dependence on central government transfers persist. These findings highlight the importance of tax reform, increased transparency, and the optimization of Local Own-Source Revenue (PAD) to create a fairer and more efficient fiscal system. This study provides policy recommendations to promote inclusive and sustainable economic development.

Keywords: *Development, State Revenue, Fiscal System.*

ABSTRAK

Penerimaan negara dan distribusi beban pemerintah merupakan faktor fundamental dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis sumber penerimaan negara, seperti pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta distribusi beban pemerintah melalui APBN dan APBD dalam perspektif pembangunan ekonomi. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan data dari sumber tepercaya, termasuk buku, artikel ilmiah, dan laporan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak merupakan kontributor utama penerimaan negara dengan realisasi Rp1.932,4 triliun pada 2024, sementara PNBP mencapai Rp579,5 triliun. Distribusi dana perimbangan terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah, meskipun tantangan seperti inefisiensi anggaran dan ketergantungan pada dana transfer pusat masih ada. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi perpajakan, peningkatan transparansi, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menciptakan sistem fiskal yang lebih adil dan efisien. Studi ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pembangunan, Penerimaan Negara, Sistem Fiskal.*

PENDAHULUAN

Penerimaan negara adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah dari berbagai sumber untuk membiayai seluruh kegiatan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan dan barang publik (Farum, 2022). Sumber penerimaan negara di Indonesia terdiri dari tiga jenis, yaitu pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan hibah. Pengelolaan penerimaan negara ini melibatkan peran Menteri Keuangan, Presiden, dan DPR, serta memiliki keterkaitan erat dengan implementasi sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" (Ridwan & Nawir Suciawan, 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu mengembangkan berbagai sektor ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Realisasi pembangunan ini memerlukan pendanaan yang memadai agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar (Adhitama & Joshua, 2023).

Sejalan dengan upaya mengoptimalkan penerimaan negara, kebijakan otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antarwilayah, sehingga menciptakan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan (Andrianda & Rosada, 2024), dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memegang peranan penting sebagai sumber pendanaan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah (Harahap & Effendi, 2020). PAD yang memadai diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang merata di setiap daerah. Optimalisasi pemungutan, penambahan jenis retribusi, serta pemberian fleksibilitas bagi daerah dalam menggali potensi penerimaan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan PAD (Karmila, 2020). PAD

dan penerimaan negara secara keseluruhan saling berkaitan dalam membiayai program pembangunan ekonomi dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Distribusi beban pemerintah, terutama melalui alokasi dana perimbangan, juga berperan penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Menurut Oktavia dalam (Berylian et al., 2024), distribusi pendapatan negara ke daerah merupakan elemen krusial dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang bertujuan menjamin pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Distribusi pendapatan didefinisikan sebagai alokasi kekayaan atau pendapatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat, yang harus dilakukan secara adil dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi (Qadir, 2021).

Berbagai penelitian telah membahas hubungan antara penerimaan negara, distribusi beban pemerintah, dan pembangunan ekonomi. Salah satu penelitian yang relevan adalah "Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan" yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan (Anugra et al., 2019). Selain itu, penelitian "Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat" menunjukkan bahwa ketidakseimbangan distribusi fiskal dapat memperparah kesenjangan antarwilayah (Pambudi, 2023).

Meskipun banyak penelitian telah membahas penerimaan negara dan distribusi beban pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam memahami bagaimana keduanya saling berinteraksi dan berdampak langsung pada

pembangunan ekonomi, baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Studi ini berusaha mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis sistem fiskal Indonesia secara lebih menyeluruh, khususnya dari segi efisiensi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan memahami dinamika tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem fiskal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sumber-sumber penerimaan negara dan distribusi beban pemerintah dalam perspektif pembangunan ekonomi, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Pajak

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara sekaligus bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk kebutuhan operasional maupun pembangunan nasional. Tujuan utama dari sistem perpajakan ini adalah mewujudkan kesejahteraan yang merata, mencakup aspek material dan spiritual, serta mendukung tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat (Rahmawati & Kamil, 2022). Pajak memegang peran krusial dalam mendukung proses pembangunan suatu negara, terutama di Indonesia. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pajak berfungsi sebagai sumber utama pendanaannya. Tanpa penerimaan pajak yang optimal, pelaksanaan pembangunan tidak akan berjalan secara efektif. Untuk

memaksimalkan penerimaan pajak, diperlukan peran aktif dari pemerintah dalam mengelola sistem perpajakan serta kesadaran dan kepatuhan dari para wajib pajak (Suci et al., 2023). Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara berperan dalam membiayai kebutuhan publik dan pembangunan nasional, sehingga peningkatan penerimaan pajak dapat mendorong kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut Anindita dalam (Amelia et al., 2022), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pendapatan yang dihasilkan dari pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, menyediakan layanan publik, mengelola kekayaan negara, serta memanfaatkan sumber daya alam. PNBP menjadi salah satu elemen penting dalam penerimaan negara selain pajak dan berkontribusi signifikan dalam mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah. PNBP memiliki peran signifikan dalam mendukung penerimaan negara serta pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Optimalisasi PNBP melalui pengelolaan kekayaan negara dan pemanfaatan sumber daya alam diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah.

Hibah

Menurut Sianturi dalam (Manik, 2022) Hibah merupakan pemberian berupa uang, barang, atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik daerah, masyarakat, atau

organisasi kemasyarakatan. Pemberian ini memiliki peruntukan yang telah ditentukan secara khusus, bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara berkelanjutan. Hibah berperan dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui pemberian dana, barang, atau jasa yang dialokasikan untuk tujuan tertentu. Hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, atau organisasi kemasyarakatan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan daerah.

Pembangunan Ekonomi

Menurut Suyanto dalam (Martono et al., 2024), Pembangunan ekonomi, sebagai proses peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui produksi dan distribusi barang dan jasa secara berkelanjutan, memerlukan kebijakan fiskal yang efektif. efektivitas kebijakan fiskal berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penggunaan instrumen perpajakan, pengeluaran publik, dan pinjaman oleh pemerintah berpotensi mempengaruhi distribusi sumber daya serta kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan perpajakan, pengeluaran publik, dan pinjaman oleh pemerintah untuk mempengaruhi kondisi ekonomi dan mencapai hasil yang diinginkan (Meiyenti et al., 2023). Kebijakan fiskal merupakan bagian dari strategi ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Sebagaimana diketahui, anggaran negara disusun berdasarkan berbagai sumber pendapatan. Pajak menjadi salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan negara, yang dikenakan kepada individu

maupun badan usaha yang tergolong sebagai wajib pajak. Selain pajak, kebijakan fiskal juga mencakup aspek pengeluaran negara dalam mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Masrufah, 2022). kebijakan fiskal yang efektif, melalui optimalisasi penerimaan pajak, pengelolaan pengeluaran publik, dan pemanfaatan pinjaman pemerintah, memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Semakin baik strategi fiskal yang diterapkan, semakin besar kemungkinannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur, atau sering disebut dengan literature review, yang bertumpu pada berbagai sumber tepercaya, seperti buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian sebelumnya (Firdha et al., 2021). Pendekatan ini dilakukan melalui penelaahan sistematis terhadap literatur yang relevan dengan tema utama, yaitu “Analisis Penerimaan Negara Dan Beban Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia”

Sebagai sumber data, penelitian ini memanfaatkan buku, laporan resmi, data statistik, serta artikel ilmiah yang telah terverifikasi untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh. Kredibilitas sumber menjadi prioritas utama agar hasil kajian tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sumber-Sumber Penerimaan Negara

Sumber utama penerimaan negara diperoleh dari Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan analisis data penerimaan negara, ditemukan bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dengan kontribusi lebih dari 80% terhadap total pendapatan nasional. Hingga 31 Desember 2024, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun, atau 100,5% dari target yang telah ditetapkan. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kementerian Keuangan RI, 2025). Peningkatan pajak sebagai sumber penerimaan negara menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir, didorong oleh reformasi perpajakan dan digitalisasi sistem pajak. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperluas basis pajak, terutama di sektor informal.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2024 mencapai Rp579,5 T atau 117% dari target, ditopang kinerja BUMN, inovasi layanan, dan peningkatan kinerja BLU yang semakin baik (Kementerian Keuangan RI, 2025). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mengalami peningkatan, khususnya dari sektor sumber daya alam dan layanan publik. Meskipun demikian, kontribusi PNBP terhadap total penerimaan negara masih tergolong kecil dibandingkan pajak, sehingga diperlukan strategi diversifikasi sumber pendapatan.

Distribusi Beban Pemerintah

Distribusi beban pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran

krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi yang merata. Realisasi pengeluaran negara untuk dana perimbangan pada tahun 2024 mencapai Rp719.578,80 miliar (BPS Indonesia, 2024), yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa daerah dengan alokasi dana perimbangan yang lebih besar cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah dengan dana yang lebih terbatas. Hal ini menegaskan bahwa distribusi fiskal yang optimal dapat menjadi instrumen efektif dalam mempercepat pembangunan daerah serta mendorong keseimbangan ekonomi nasional.

Pemerintah mengelola utang secara hati-hati dan terukur untuk menjaga stabilitas fiskal serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun rasio utang terhadap PDB sempat meningkat akibat pandemi, pemerintah berhasil menurunkannya menjadi 38,68% pada Juli 2024, tetap jauh di bawah batas aman 60% sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2003. Mayoritas utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang berperan dalam memperkuat daya tahan sistem keuangan terhadap guncangan global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2024). Namun, pengelolaan utang yang baik perlu diimbangi dengan distribusi fiskal yang lebih merata agar manfaat pembangunan dirasakan secara luas. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa alokasi dana perimbangan yang tidak proporsional dapat memperparah ketimpangan antarwilayah.

Dampak Terhadap Pembangunan Ekonomi

Interaksi antara penerimaan negara dan distribusi beban pemerintah berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Studi ini menemukan bahwa efektivitas distribusi fiskal dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) serta menurunkan tingkat kemiskinan di beberapa daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi lebih mampu membiayai proyek infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, yang pada akhirnya meningkatkan daya saing ekonomi.

Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah inefisiensi dalam penggunaan anggaran, di mana beberapa daerah masih mengalami kebocoran anggaran serta alokasi yang tidak tepat sasaran. Selain itu, ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat masih tinggi, sehingga beberapa daerah belum mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pendanaan utama.

Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Anugra et al., 2019), yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki hubungan erat dengan distribusi pendapatan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan (Pambudi, 2023), yang menyatakan bahwa distribusi dana perimbangan berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, penelitian ini memberikan tambahan wawasan dengan menyoroti aspek efisiensi dan keadilan dalam sistem fiskal, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam sistem fiskal Indonesia:

a. Peningkatan Efektivitas Dana Perimbangan:

Penelitian yang dilakukan oleh (Prastiwi & Aji, 2020), menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Pemerintah perlu mengembangkan mekanisme distribusi Dana Perimbangan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik tiap daerah, sehingga alokasi anggaran lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Keistimewaan, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang menegaskan pentingnya kebijakan distribusi dana yang lebih adil dan berbasis kebutuhan.

b. Reformasi Pajak

Keberhasilan reformasi perpajakan di Norwegia, sebagaimana dibahas dalam artikel "Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia" (Tambunan, 2020), memberikan implikasi penting bagi kebijakan fiskal di Indonesia. Penerapan kebijakan seperti penurunan tarif pajak yang selektif, pencegahan pengalihan laba, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem fiskal. Reformasi ini tidak hanya memperkuat penerimaan negara, tetapi juga memastikan distribusi beban pajak yang

lebih adil, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. **Transparansi dan Akuntabilitas**

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurohmayni Putri, 2024), menunjukkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik yang efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan infrastruktur teknologi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan dan evaluasi dalam penggunaan anggaran daerah agar lebih tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran.

d. **Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhayati, 2020), menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kabupaten Kuningan memiliki potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kontribusinya masih belum optimal. Optimalisasi sektor ini dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat, serta mendorong desentralisasi fiskal yang lebih efektif

dan digitalisasi sistem. Sementara itu, PNBP juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp579,5 triliun, meskipun kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan pajak.

Distribusi beban pemerintah melalui APBN dan APBD, khususnya dana perimbangan, terbukti efektif dalam mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, tantangan seperti inefisiensi anggaran, ketergantungan pada dana transfer pusat, dan kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diatasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyoroti pentingnya distribusi fiskal yang adil dan efisien dalam mendorong pembangunan ekonomi. Implikasi kebijakan yang direkomendasikan meliputi peningkatan efektivitas dana perimbangan, reformasi perpajakan, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta optimalisasi PAD. Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan sistem fiskal Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif serta mengurangi ketimpangan antarwilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitama, S., & Joshua, S. (2023). Analisis Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum Politeknik Keuangan Negara Stan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 7(2), 233–253. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2023.v7.i2.5368>
- Amelia, Y. N., Sinaga, Y. F., & Hernawati, E. (2022). Pengaruh PNBP Berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang

KESIMPULAN

Sumber-sumber penerimaan negara, terutama dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memegang peran krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pajak menjadi kontributor utama penerimaan negara dengan realisasi mencapai Rp1.932,4 triliun pada tahun 2024, atau 100,5% dari target, didorong oleh reformasi perpajakan

- Negara Dan Bea Lelang Pada PNPB KPNL Bandung. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 5(2), 117. <https://doi.org/10.32493/skt.v5i2.12717>
- Andrianda, Y., & Rosada, A. (2024). Pengaruh DBH, DAU, dan DAK Terhadap Tingkat Kemandirian Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 8(2), 168–182. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v8i2.3206>
- Anugra, R., Marwa, T., & Imelda, I. (2019). Analisis hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 31–40. <https://doi.org/10.29259/jep.v14i1.8773>
- Berylian, G. J., Donald Richardo Aronggear, M., Dhia Yusrana, R., & Parhusip, J. (2024). Analisis Distribusi Rata-Rata Anggaran Pendapatan APBN 2024 Di Tingkat Provinsi. *Jurnal Ilmu Teknik Dan Informatika*, 4, 24–29. <https://doi.org/10.51903/teknik>
- BPS Indonesia. (2024, March 1). *Realisasi Pengeluaran Negara (Keuangan) (Milyar Rupiah), 2022-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA4NSMy/realisasi-pengeluaran-negara--keuangan-.html>
- Farum, L. O. (2022). ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA. *JJAR: Journal Of International Accounting Research*, 1(01), 45–57. <https://doi.org/10.62668/jiar.v1i01.119>
- Firdha, N., Fitri, R., Selaras Hijrah, G., & Saputra Gede Ngurah, I. (2021). Studi Literatur Tentang Peningkatan Kompetensi Belajar Peserta Didik Melalui Kegiatan Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Lesson Study. *Prosding SEMNAS BIO 2021, 1*, 1005–1013.
- Harahap, B., & Effendi, S. (2020). Analisis Kinerja Pemungutan Dan Retribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. *JIM UPB*, 8(2), 2020. <http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim>
- Karmila, D. (2020). Efektivitas Penerimaan Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 9(1), 54–63. <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i1.9239>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2024, August 23). *Utang Pemerintah yang Tetap Terkendali Mendukung Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional*. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5937/utang-pemerintah-yang-tetap-terkendali-mendukung-stabilitas-dan-pertumbuhan-ekonomi-nasional>
- Kementerian Keuangan RI. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi>

- publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif
- Manik, N. U. R. (2022). Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 407–414. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i8.98>
- Martono, M., Dahlan, A., & Nurlaeli, I. (2024). Studi Pembangunan Ekonomi: Telaah atas Teori-Teori. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 5(2), 157. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v5i2.22948>
- Masrufah, L. (2022). Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Perekonomian. *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 38–55. <https://doi.org/10.53948/kasbana.v2i1.37>
- Meiyenti, I., Agustina, I., Primadhany, E. F., Tumija, & Nalien, E. M. (2023). Menganalisis Kebijakan Fiskal dan Moneter: Dampaknya terhadap Stabilitas Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 186–195. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.503>
- Nurhayati, N. (2020). Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i2.3392>
- Nurohmayni Putri. (2024). Analisis Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Lampung. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 01–04. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i2.680>
- Pambudi, A. S. (2023). Potret Temuan Implementasi Pembangunan Bidang Pendidikan: Studi Kasus Dana Transfer Khusus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 193–212. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i2.173>
- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>
- Qadir, A. (2021). Efisiensi Distribusi Pendapatan Dalam Ekonomi Islam. *Mozaic : Islam Nusantara*, 7(1), 47–60. <https://doi.org/10.47776/mozaic.v7i1.174>
- Rahmawati, R., & Kamil, I. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Layanan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Margin: Jurnal Lentera Manajemen Keuangan*, 1(02), 85–93. <https://doi.org/10.59422/margin.v1i02.125>
- Ridwan, & Nawir Suciawan, I. (2021). *Buku Ekonomi Publik* (F. Ridwan Muhammad, Ed.; 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Suci, B. M., Putri, T. E., & Eprianto, I. (2023). PENGARUH KESADARAN PAJAK, SOSIALISASI PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.

JURNAL ECONOMINA, 2(9), 2375–2385.

<https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.817>

Tambunan, M. R. U. D. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.31092/jpi.v4i1.648>